

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN MENUJU  
PARLEMEN DI KOTA BANDA ACEH**

Teungku Agam Rizki  
NPP. 29.0071

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Program  
Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: agam9606@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This research is motivated by the representation of women in the legislature still describes discrimination against gender. The hope of women to be able to take part optimally in accordance with the order of the law has not been realized until now due to various obstacles, especially recruitment issues. On another aspect, it is alleged that the community does not yet have the attraction to be active in politics as the owner of aspirations due to several problems, both internal and external. Political parties are instruments for building a nation's democracy with the aim of obtaining constitutional political power. Such power is impossible to obtain if there is no synergy between the community and political parties. The role of political parties is crucial so that it will determine the formation of a democratic building. The techniques and strategies of political parties in evoking and instilling understanding in the community are the main keys to the success of implementing the functions of political parties as a means of: recruitment; political education; political communication; and conflict management. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. **Purpose:** This study aims to find out how the role of political parties and the interest of women in participating in politics are built and what are the supporting and inhibiting factors in carrying out political communication. **Methods:** In carrying out research, an approach or method is needed that can be used to facilitate the process of carrying out research so that the objectives of carrying out research can be achieved. The research method used is descriptive qualitative. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. . In this study using the theory of the role of Hoeroepoetri, Arimbi, and Sentosa where there are five dimensions. **Results/Findings:** The results show that the inhibiting factors for women in politics are the roles of political parties that have not been maximized and the lack of trust in women. **Conclusion:** Political parties have not been able to develop their candidates, especially women to speak a lot in democratic contests which has an impact on the lack of women's involvement due to lack of trust from the community

**Keyword:** *Political Parties, Role, and Woman*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif masih menggambarkan diskriminasi terhadap gender. Harapan kaum perempuan untuk dapat berkiprah secara optimal sesuai perintah undang-undang belum dapat terwujud hingga saat ini disebabkan berbagai kendala terutama persoalan rekrutmen. Pada aspek lainnya, disinyalir bahwa masyarakat belum memiliki daya tarik untuk aktif berpolitik sebagai pemilik aspirasi dikarenakan beberapa persoalan baik internal maupun eksternal. Partai politik merupakan instrumen pembangun demokrasi bangsa yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional. Kekuasaan dimaksud mustahil diperoleh manakala belum terjadi sinergitas antara masyarakat dengan partai politik. Kehadiran partai politik menjadi krusial sehingga akan menentukan terbentuknya bangunan demokrasi yang kokoh. Teknik dan strategi partai politik dalam menggugah serta menanamkan pemahaman kepada masyarakat adalah kunci utama keberhasilan penyelenggaraan fungsi parpol sebagai sarana: rekrutmen; pendidikan politik; komunikasi politik; dan pengatur konflik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran partai politik dan ketertarikan perempuan ikut berpolitik yang dibangun serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan komunikasi politik. **Metode:** Dalam melaksanakan penelitian diperlukan sebuah pendekatan atau metode yang dapat digunakan untuk mempermudah selama proses pelaksanaan penelitian agar tujuan dalam melaksanakan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan menggunakan teori Peran dari Hoeropoetri, Arimbi, dan Sentosa dimana terdapat lima dimensi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada factor penghambat perempuan berpolitik terdapat pada peran partai politik yang belum maksimal serta kurangnya kepercayaan terhadap perempuan. **Kesimpulan:** Partai politik belum mampu mengembangkan calon-calon nya terutama kaum perempuan untuk berbicara banyak pada kontes demokrasi yang berimbas pada kurangnya keterlibatan perempuan akibat tidak ada kepercayaan dari masyarakat

**Kata Kunci:** Partai Politik, Peran, dan Perempuan



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perempuan merupakan bagian dari kekuatan yang tidak terpisahkan dalam menentukan keberhasilan pada perjuangan melawan penjajah demi memperoleh kemerdekaan bangsa. Berbagai tempat dalam wilayah Nusantara telah melahirkan para srikandi yang tidak kenal takut kepada kekejaman penjajah. Para pejuang wanita tersebut secara gigih melawan kolonial dengan cara masing-masing sesuai tuntutan keadaan.

Menilik pada kegigihan pejuang perempuan dalam membebaskan negeri dari tindasan penjajah, patut kiranya bangsa, negara dan masyarakat memberikan apresiasi kepada para pahlawan tersebut. Mereka tidak pernah menuntut balas jasa, akan tetapi sangat patut dipikirkan oleh generasi penerus untuk mengingat serta menghargainya dalam bentuk lain. Bentuk lain dari penghargaan itu adalah kesempatan bagi kaum perempuan masa kini ikut serta mengelola bangsa dan negara. Salah satu aktualisasi penghargaan adalah partisipasi kaum perempuan dalam parlemen.

Berkenaan dengan kehadiran perempuan dalam parlemen masih menjadi pro dan kontra bagi masyarakat Banda Aceh. Secara tradisional memang masyarakat Aceh masih memandang tabu bilamana perempuan terjun dalam kancah politik praktis. Kondisi ini dimungkinkan oleh rasa kurang nyaman pada kaum laki-laki bila harus berkumpul secara intens dengan lawan jenis. Pada sisi lain segala kemungkinan buruk dapat saja terjadi ketika komunitas berlainan jenis sering bercengkerama.

Sejauh ini keterwakilan perempuan dalam parlemen masih sangat miris kalau tidak mau disebut memprihatinkan. Hingga saat ini jumlah perempuan di parlemen Kota Banda Aceh belum menyentuh angka 15% atau setengah dari kuota keterwakilan minimal yakni 30%. Angka 30% hanya dapat dipenuhi oleh setiap partai politik peserta pemilu pada tahapan pencalonan saja karena perintah undang-undang. Sedangkan kehadiran perempuan sebagai pembawa aspirasi dan pemberi masukan dalam pengambilan keputusan dewan belum mencapai batas memuaskan.

Secara umum keterwakilan perempuan dalam lembaga DPRK Banda Aceh lebih tinggi dari DPRK lainnya dalam Provinsi Aceh. Pada Pemilu 2019 DPRK Banda Aceh mengirim 4 (empat) orang atau setara 13% legislator perempuan. Fakta memperlihatkan persentase jumlah legislator perempuan sudah pada angka dua digit. Jumlah tersebut masih sangat jauh di bawah batas minimal perempuan yang diinginkan oleh undang-undang. Oleh karena itu masih memerlukan berbagai upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan kaum perempuan agar bisa mendekati angka 30%.

Penurunan motivasi kaum perempuan untuk berkecimpung di dalam kancah politik praktis mencerminkan bahwa hasil kerja partai politik di Kota Banda Aceh belum memberi kebanggaan bagi masyarakat. Kondisi tersebut bisa saja disebabkan oleh kecenderungan penerapan dinasti politik di dalam kepengurusan dan atau calon anggota legislatif dalam suatu partai. Buntut dari hal demikian bukan saja akan menurunkan motivasi kaum perempuan menuju parlemen, akan tetapi juga dapat terjadi pengalihan alamat dukungan dari pemilih kepada kontestan laki-laki pada saat pemberian suara.

Memperhatikan kronologis uraian dan argumentasi yang dipaparkan di atas, penulis memandang perlu merencanakan sebuah upaya penelusuran informasi dalam rangka menemukan penyebab terjadinya stagnasi partisipasi kaum perempuan dalam parlemen Kota Banda Aceh untuk menemukan alternatif langkah perubahan pada kedua objek yang menjadi perhatian. Oleh karena itu penulis mengambil topik penulisan skripsi yang akan dituangkan ke dalam judul "**Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kaum Perempuan Menuju Parlemen di Kota Banda Aceh**".

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Budaya patriarki membuat kaum perempuan tidak memiliki ruang sebesar kaum laki-laki dalam politik. Laki-laki menjadi lebih dominan dalam dunia politik, dapat dibuktikan dengan hasil pemilihan legislatif yang di mana jumlah calon legislatif terpilih perempuan di bawah 30 persen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 yang sebelumnya UU No. 10 Tahun 2008 merupakan peraturan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif minimal 30 persen. UU tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD. Namun, dari periode 2009-2019 sampai sekarang keterwakilan perempuan belum pernah mencapai 30 persen.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti menjelaskan hasil penelitian berjudul “**Motivasi Caleg Perempuan Ditinjau dari Asal Partai Politik**”. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa secara umum minat dan motivasi kaum perempuan dalam berpolitik masih dianggap tinggi. Motivasi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperjuangkan nasib kaumnya yang sulit untuk dipahami oleh legislator laki-laki. Motivasi kaum perempuan juga dipecah oleh beberapa nama pahlawan Aceh yang tersohor pada masa lalu. Perempuan merasa lebih nyaman jika bernaung dalam partai politik yang memahami aspirasi masyarakat setempat. Hal ini akan mendorong kaum perempuan untuk bergabung dengan partai lokal dibandingkan dengan partai berbasis nasional. Kedekatan dengan sosok figur pentolan partai politik juga menjadikan penyemangat kaum perempuan untuk bergabung dengan partai tersebut. Oleh karena itu tinggi atau rendahnya motivasi kaum perempuan tidak terlepas dari hubungan emosional yang terbangun.

Peneliti menjelaskan hasil penelitian berjudul “**Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang**”. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa partai politik sudah saatnya menjadikan perempuan sebagai bagian penting dari pelaku perpolitikan bangsa. Hal ini disebabkan hanya perempuan saja yang sangat memahami kebutuhan khusus mereka sendiri. Kebutuhan mendesak sangat berkaitan dengan kebutuhan kesehatan reproduksi (hamil dan melahirkan). Secara statistik menunjukkan terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dalam parlemen sejak pemilu 2004. Jumlah perempuan yang terpilih sebagai legislator pada pemilihan umum 2019 menjadi anggota DPR RI sebanyak 118 dari 575 (20,5%) adalah jumlah terbesar sepanjang sejarah parlemen tanah air. Meski belum mencapai angka 30% namun hasil pemilu 2019 merupakan prestasi tertinggi yang ditoreh kaum perempuan dalam hal keterwakilan sebagai pembawa aspirasi masyarakat di parlemen.

Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian berjudul “**Peranan Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Berkarakter Terhadap Masyarakat**”. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa partai politik adalah pilar utama penyangga demokrasi pada sistem politik. Pendidikan politik harus terus berjalan. Pendidikan atau sosialisasi politik didefinisikan sebagai proses pemberian pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara melalui pembelajaran secara baik. Partai politik harus mampu menghadirkan kader terbaik sebagai calon pemimpin bangsa pada masa yang akan datang. Hajat besar ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang berintegritas, berdedikasi, dan bersemangat dalam bingkai pengabdian. Partai politik juga menjadi sarana untuk mewujudkan pendidikan politik bernilai strategis bagi anggota dan masyarakat agar menjadi warga negara yang sadar akan kewajiban dan hak dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan dari tiga referensi tersebut dengan penelitian ini adalah perbedaan lokasi penelitian serta fokus masalah pada penelitian ini yaitu tingkat keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRK Kota Banda Aceh dan apa saja faktor yang mempengaruhi keterwakilan tersebut, selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan studi kasus

### 1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja faktor penghambat sehingga jumlah calon legislatif perempuan terpilih tidak mencapai 30 persen serta apa yang mempengaruhi kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Penelitian yang akan dilaksanakan mengarah pada gejala dalam masyarakat sebagai akibat dari suatu sebab. upaya partai politik dalam memberikan pencerahan kepada kaum perempuan agar lebih partisipatif

Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif perihal makna dari sesuatu data yang tampak pada kejadian (Sugiyono, 2020: 35). Karena topik riset terkait dengan gejala sosial, peneliti menilai bahwa tipe **studi kasus** adalah strategi paling tepat (Muri, 2014: 339). Tipe studi kasus mengusung tujuan untuk mengambil makna dari data yang tersedia hingga dapat memahami kondisi peristiwa (Ghony, 2012: 62)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai Faktor-Faktor Penghambat Sehingga Jumlah Calon Legislatif Perempuan Terpilih Tidak Mencapai 30 Persen adalah sebagai berikut :

#### 3.1. Regulasi

Regulasi adalah indikator dari dimensi sistem pemilihan dari teori yang peneliti gunakan. Regulasi bukanlah salah satu faktor penghambat yang membuat perempuan yang maju pada pencalonan anggota DPRK kalah. Karena dengan regulasi yang sudah ada bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan pada pencalonan anggota DPRK. Regulasi-regulasi tersebut yaitu :

1. UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 52, 53, 54 mewajibkan partai peserta pemilu untuk memasukkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD.
2. UU No. 8 Tahun 2012 Pasal 56 ayat 2 berbunyi “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) perempuan bakal calon.
3. UU RI No. 2 Tahun 2008 Pasal 11, fungsi partai politik

Kami mewawancarai ibu Tati Muti Asmara yang merupakan caleg terpilih yang kini menduduki salah satu kursi sebagai anggota legislatif DPRK Kota Banda Aceh, ibu Tati menyatakan bahwa “sebenarnya, peraturan keterwakilan perempuan ini sudah dirasa bagus sekali dan sudah membuka ruang politik untuk perempuan, tapi peraturan juga tidak bisa dijadikan sebagai jaminan, tergantung dari kualitas yang menentukan elektabilitasnya dan dari parpol sendiri juga hanya mengirimkan caleg perempuan hanya untuk memenuhi syarat minimal 30% tersebut”.

Terakhir, kami mewawancarai Sekretaris KIP Kota Banda Aceh Bapak Erminzal, S.H. yang mana pada saat itu beliau menyatakan bahwa:

“Regulasi Undang-Undang tentang 30 persen keterwakilan perempuan belum ada mekanisme yang mengatur hal itu di tingkat partai politik supaya orang-orang yang bisa masuk ke dalam daftar calon anggota DPRD adalah orang-orang yang sudah diverifikasi dan sudah diuji publik. Jadi diperlukan regulasi yang bisa dijadikan rujukan oleh kami (KIP) supaya kita bisa tau kalau orang-orang yang terdaftar ke dalam daftar calon anggota DPRK ini memang berkualitas”.

Berdasarkan uraian di atas, Meskipun masih belum ada regulasi yang mengatur tentang mekanisme verifikasi dan uji publik terhadap calon-calon anggota DPRK di tingkat partai politik untuk membuktikan kualitas dari setiap calon anggota DPRK. Namun regulasi-regulasi mengenai pemilihan DPRK Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik dan memang sudah membuka ruang bagi para wanita yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi, dibuktikan juga dengan jumlah minimal calon legislatif perempuan pada pemilihan legislatif sudah mencapai 30 persen.

Penulis menyimpulkan berdasarkan data yang dipaparkan dan hasil wawancara bahwa dimensi sistem pemilihan dengan indikator regulasi dari teori Peran dari Hoeropoetri, Arimbi, dan Sentosa tidak relevan dengan keadaan yang terjadi di Kota Banda Aceh.

#### 3.2. Informasi Politik

Informasi Politik adalah indikator dari dimensi media massa dari teori yang peneliti gunakan. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Anggota KIP Kota Banda Aceh Bapak Hasni dimana beliau menyatakan “Media massa rata-rata menyoroti mengenai bakat dan prestasi para perempuan baik di legislatif”.

Selanjutnya, penulis mewawancarai Anggota DPRK Kota Banda Aceh Ibu Tati dan beliau menyatakan “Media massa selama ini hanya menjaga independensinya saja, walaupun ada perempuan yang maju, mereka hanya mempromosikan lewat program-programnya saja, tetapi untuk mengajak tidak pernah mereka lakukan”.

#### 3.3. Minat Perempuan dan Ketertarikan Masyarakat serta Peran Partai Politik

Minat perempuan dan ketertarikan masyarakat adalah indikator dari dimensi kemauan perempuan dari teori yang peneliti gunakan. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala Desa Geuce Meunara (13 Januari 2022), beliau menyatakan:

“Perempuan yang punya minat untuk maju sebagai anggota legislative itu masih sedikit karena kemampuan

yang terbatas untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dikarenakan mengurus rumah tangganya dan terkadang suami masih melarang”.

Selanjutnya, penulis mewawancarai mantan Walikota Banda Aceh ibu Illiza Sa'udin Jamal (8 Januari 2022), dan beliau menyatakan :

“Ketertarikan perempuan untuk ikut serta dalam parlemen dikarenakan masyarakat kurang mempercayai caleg perempuan sehingga para perempuan sudah merasa kalah sebelum berperang”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Sekretaris Partai Demokrat Aceh bapak Arief Fadilla (2 Januari 2022), beliau menyatakan:

“Kami sudah mengusahakan mengadatkan para perempuan untuk ikut serta dalam berpolitik namun minat masyarakat memang kurang karena adat Aceh ini mengatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin serta metode kampanye pada saat ini memang menggunakan media sosial apalagi masih dalam masa pandemic sehingga kaum marginal yang belum tersentuh oleh teknologi mengalami keterbatasan informasi”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Keuchik Geuce Meunara Bapak Aidil Azhary (11 Januari 2022), beliau menyatakan:

“kurangnya perempuan yang terlibat dalam politik menandakan budaya islam di Aceh masih sangat kuat yang mana melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin disamping itu didukung juga dengan fakta bahwa masyarakat belum banyak yang percaya kepada caleg perempuan”.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ketua RT Bapak Rahmat (6 Januari 2022), beliau menyatakan:

“Fakta dan pemikiran bahwa perempuan adalah makhluk dapur masih sangat melekat di pikiran rakyat Aceh sehingga mereka tidak mau memilih caleg perempuan”.

Peneliti juga mewawancarai Kaum pemuda (8 Januari 2022), dan beliau menyatakan: “Perempuan itu gak kepilih atau jarang ikut politik jarena waktu mereka lebih difokuskan untuk mengurus keluarga sama kerjaan rumah sehingga partai politikpun kurang berminat untuk mengadatkan perempuan”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, terlihat bahwa masyarakat masih memiliki pikiran bahwa perempuan dirasa tidak berkompeten terutama dalam kesediaan waktunya dikarenakan terbentrok dengan urusan keluarga yang mana hal ini membuat laki-laki lebih dominan untuk menjadi anggota legislatif dibandingkan perempuan. Selain itu, hasil dari pemilihan Anggota DPRK Kota Banda Aceh juga menjadi bukti bahwa pendukung perempuan tidak sebanyak pendukung laki-laki.

Berdasarkan uraian di atas, minat perempuan untuk maju merebutkan kursi anggota DPRK cenderung rendah dikarenakan kebanyakan perempuan lebih fokus untuk mengurus rumah tangganya, ketika perempuan ingin maju sebagai anggota DPRK, maka banyak hal yang harus dikorbankan terutama waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Selanjutnya, dengan pikiran warga yang masih menganggap perempuan tidak pantas menjadi pemimpin di lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh mengakibatkan masyarakat cenderung mendukung laki-laki sebagai pemimpin maupun anggota DPRK. Laki-laki juga menjadi lebih dominan di ranah politik dibandingkan dengan perempuan.

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara bahwa dimensi kemauan perempuan dengan indikator minat perempuan dan indikator ketertarikan masyarakat dari teori Peran dari Hoeroepoetri, Arimbi, dan Sentosa relevan dengan keadaan di Kota Banda Aceh.

### **3.4. Budaya Politik**

Budaya Politik adalah indikator dari dimensi Budaya dari teori yang peneliti gunakan. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Anggota DPRK ibu Zubaidah (9 Januari 2022), beliau menyatakan “budaya islam di Kota Banda Aceh tu masih kuat, di sini saja, yang jadi RT, RW, dan sebagainya itu didominasi dari laki-laki, karena kadang suami gak bolehin terus harusnya parpol mampu menutupi kekurangan tersebut”.

Selaras dengan pernyataan ibu Sunarti, Anggota DPRD ibu Intan Nirmala (6 Januari 2022) juga menyatakan: “Budaya politik yang masih ada di masyarakat Kota Banda Aceh adalah budaya islam, akhirnya politik tu masih lebih didominasi oleh laki-laki. Masyarakat juga lebih percaya kalo laki-laki yang jadi anggota DPRK daripada perempuan karena perempuan dianggap tidak akan kompeten dan islam pun melarang perempuan menjadi pemimpin”.

Berdasarkan uraian di atas, budaya politik yang ada di Kota Banda Aceh menjadi hambatan utama untuk para perempuan. Budaya politik tersebut yaitu budaya syariat islam dan budaya money politics.

Peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara bahwa dimensi budaya dengan indikator budaya politik dari teori Peran dari Hoeroepoetri, Arimbi, dan Sentosa relevan dengan keadaan yang terjadi di Kota Banda Aceh.

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti mendapatkan hasil penelitian dimana faktor-faktor penghambat sehingga calon legislatif perempuan terpilih tidak mencapai 30 persen dan tujuan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh bapak Muhamad Labolo, dkk berbeda.

Selanjutnya, hasil yang ditemukan dari penelitian yaitu jumlah calon legislatif perempuan pada tahap pencalonan sudah mencapai 30 persen, namun keanggotaan dari DPRD tidak berkomposisi 30 persen perempuan, penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian Ukhti Raqim.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari teori Peran dari Hoeroepoetri, Arimbi, dan Sentosa dalam penelitian ini dengan menggunakan lima dimensi, yakni dimensi Kebijakan, dimensi Strategi, dimensi Alat Komunikasi, dimensi Penyelesaian Sengketa, dan dimensi Terapi. Dimensi yang tidak relevan dengan keadaan di Kota Banda Aceh adalah dimensi Alat Komunikasi dan dimensi Terapi. Dimensi yang relevan dengan keadaan di Kota Banda Aceh adalah dimensi Kebijakan, Strategi, dan Penyelesaian Sengketa.

Sehingga teori Peran dari Hoeroepoetri, Arimbi, dan Sentosa hanya bisa digunakan sebatas dua dimensi pada kasus di Kota Banda Aceh karena teori ini tidak universal dan hanya berlaku secara parsial.

**Keterbatasan Penelitian:** yakni waktu yang dimiliki dari para anggota DPRK yang terbatas, sehingga harus mencari waktu yang tepat agar dapat melaksanakan wawancara.

**Arah Masa Depan Penelitian:** penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa namun berfokus pada pendapat responden atau pemilihnya agar data mengenai pendapat masyarakat lebih konkrit.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada para informan khususnya para anggota KIP, anggota DPRD Perempuan, serta masyarakat yang telah meluangkan waktu yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Labolo, M., Djaenuri, M. A., Ilham, T., & Fadhilah, H. A. (2019). *Politik Gender Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung* (Vol. 53, Issue 9). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nimrah, S., & Sakaria. (2015). *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)*. 1, 173–182.
- Nurchahyo, A. (2016). *Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen*. 6, 25–34.
- Raqim, U. (2016). *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga*.
- Umagapi, J.L. (2020), *Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang*: Jurnal As-Salam, Volume 25 Nomor 1, 19-34 (Maret 2020).